

Demokrasi dan Kinerja Pers Indonesia³

I Gusti Ngurah Putra⁴

Abstract: *Mass media, especially, press have important rules in the democraton process. There are three criteria to evaluate performance of the press. Press as a civic forum, it's related to Habermas's public sphere that there is space for citizen to discuss about public interest in thhe free condition. Press as a watch-dog, that it's means press has to protec minority rights from malfuntion of majority power. Press as a mobilization agent, it's medium to increase society involment in the politic process.*

Key words: *mass media, press, civic forum, wath-dog, mobilization agent*

Sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi politik menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, media massa⁵ menjadi bagian penting yang harus juga direformasi. Istilah media massa digunakan sebagai pengganti istilah pers, mengingat istilah pers, sesuai dengan artinya cenderung hanya menekankan media cetak saja (dalam arti sempit). Memang ada juga pendapat yang menyatakan bahwa pers dalam arti luas mencakup seluruh media, baik yang bersifat cetak maupun elektronik.

Reformasi media massa, sama halnya dengan reformasi politik, di dalamnya tercakup reformasi kelembagaan media massa dan reformasi pada level praktek media dan perilaku pekerja media massa. Secara kelembagaan, dapat disaksikan perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan media massa dengan lahirnya kebebasan media seperti yang diangankan banyak kalangan. Jaminan itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar yang

³ Tulisan pernah disajikan dalam seminar 'Menggugat Profesionalisme Wartawan' yang diselenggarakan oleh Dewan Pers, Yogyakarta, 23 November 2005.

⁴ **I Gusti Ngurah Putra** adalah staf pengajar dan Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, Yogyakarta.

⁵ .

diamandemen dan peraturan tentang media yang juga telah diperbaharui mengikuti perubahan Undang-undang Dasar. Hasil dari perjuangan reformasi media massa ini terlihat dari bergairahnya kehidupan media dengan ditandai semakin banyaknya outlet media yang tersedia, baik media cetak maupun media elektronik. Walaupun demikian, harus diakui, untuk media cetak, terjadi stagnasi pertumbuhan oplah surat kabar harian. Pertumbuhan justru terjadi pada berbagai media cetak dengan sajian khusus yang umumnya menyasar kelas atas sebagai pangsa pasar utamanya.

Pada level praktek media dan perilaku pekerja media, reformasi relatif berjalan pelan. Masih banyak pekerja media yang perlu mereformasi diri agar mampu menjadi pekerja media yang sesuai dengan tuntutan reformasi sistem politik. Jika mereka ingin menjadikan media massa sebagai bagian penting dalam kehidupan politik yang demokratis, para pekerja media dituntut untuk mampu melahirkan karya-karya jurnalistik yang mampu meningkatkan keterlibatan warga negara dalam berbagai aktivitas politik yang berkualitas, sehingga mampu membawa kehidupan bangsa menjadi lebih baik.

Dalam konteks demokrasi, media massa atau pers diharapkan untuk menjadi lembaga yang ikut memperkuat demokrasi melalui peliputan kehidupan politik yang mampu mendidik publik pembaca menjadi paham isu-isu publik sehingga mampu memberi dukungan politis yang berkualitas. Oleh karena itu, usaha pada level kelembagaan sudah dilakukan melalui pembuatan Undang-undang yang menciptakan sistem media yang demokratis, namun sayangnya belum ada usaha-usaha yang serius untuk melakukan pembenahan para pekerja media.

DEMOKRASI DAN MEDIA MASSA

Dalam pembicaraan-pembicaraan tentang demokrasi, dari model langsung pada zaman Yunani Kuno dengan model negara kota (*city state*) atau *polis* sampai demokrasi perwakilan yang saat ini dipraktekkan di berbagai negara, aspek komunikasi (dan saat ini media komunikasi) tidak bisa diabaikan sebagai bagian penting berjalannya system politik yang demokratis. Pada zaman Yunani Kuno, dengan penduduk dan wilayah yang sangat terbatas, warganegara bisa berpartisipasi langsung dalam kehidupan politik. Walaupun harus dicatat, tidak setiap warga negara berhak aktif dalam kehidupan politik pada masa itu, karena ada eksklusi terhadap kelompok wanita dan orang-orang yang bukan pembayar pajak seperti para budak, misalnya. Bagi laki-laki pembayar pajak, struktur politik yang tercipta dalam polis menyediakan ruang partisipasi yang demikian besar baik pada bidang politik maupun pada bidang

hukum. Orang-orang kebanyakan dapat menjadi juri dalam pengadilan umum, yang biasanya terdiri dari ratusan orang. Annabelle Sreberny-Mohammadi (1995).

Sistem pemerintahan yang demikian ini menuntut orang agar memiliki kemampuan komunikasi (*communicative competence*) yang memadai, paling tidak dalam mode komunikasi lisan (*oral tradition*). Orang-orang dengan kemampuan penyajian lisan, baik dalam seting politik, hukum maupun upacara-upacara keagamaan biasanya mendapat pujian dan penghormatan yang tinggi dari masyarakat. Habermas (1989) dalam membahas '*public sphere*' menjadikan kehidupan politik pada masa ini sebagai kehidupan yang ideal karena orang-orang sebagai warga negara kota dapat secara bebas mendiskusikan persoalan-persoalan publik yang mereka hadapi. Kemampuan komunikasi yang dituntut oleh sistem politik model negara kota ini ditunjang oleh sistem pendidikan yang cukup baik yang melatih orang-orang untuk menjadi pembicara-pembicara ulung.

Dapat dicatat di sini adalah pentingnya model komunikasi lisan (*oral communication*) dalam kehidupan politik dengan model *city state*. Persoalannya, ketika negara berkembang menjadi negara bangsa yang terdiri dari wilayah yang luas dan penduduk yang padat mode komunikasi lisan tidak lagi memadai sebagai pendukung perealisasi kewanegaraan, terutama dalam hal keterlibatan warga negara dalam kehidupan politik. Negara modern yang berkembang kemudian dicirikan oleh sistem politik yang bersifat tidak langsung, demokrasi perwakilan.

Dalam pandangan Schumpeterian, demokrasi tak langsung atau perwakilan (*representative*) dapat dipahami dari karakteristik-karakteristik strukturalnya (Norris, 2000). Dengan menggunakan pandangan ini, demokrasi melibatkan tiga dimensi penting, yakni pertama, kompetisi pluralistik di antara partai-partai atau individu-individu untuk memperebutkan posisi atau kekuasaan politik. Kedua, partisipasi di kalangan warga masyarakat dalam pemilihan partai atau perwakilan melalui pemilu yang dilakukan secara bebas, *fair* dan teratur atau periodik. Ketiga, kebebasan sipil untuk berbicara atau mengekspresikan pikiran, menerbitkan gagasan dan berserikat sebagai kondisi yang diperlukan untuk menjamin kompetisi dan partisipasi yang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan mode komunikasi yang berbeda dengan mode komunikasi yang dimanfaatkan dalam sistem demokrasi langsung. Media komunikasi tulis cetak (pers) menjadi alat penting sebagai saluran komunikasi politik yang memungkinkan setiap warga negara bukan saja mengetahui

berbagai isu atau masalah politik nasional, tetapi juga sebagai media yang mampu menjadikan warga negara didengar kepentingannya oleh para politisi atau wakil rakyat.

Dalam konteks ini, media komunikasi massa (media massa) dalam demokrasi selalu dikaitkan dengan bagaimana warganegara dapat merealisasikan atau mewujudkan kewarganegaraannya. Mungkin dalam hal ini perlu dirujuk konsep kewarganegaraan yang dikembangkan oleh T. H. Marshall. Menurut Marshall, (dalam Murdock dan Golding (1989:180-195) ada paling tidak tiga dimensi kewarganegaraan: sipil, politik dan sosial. Hak-hak sipil berkaitan dengan kebebasan gerak individual dalam ruang masyarakat sipil (*civil society*). Termasuk ke dalamnya antara lain kebebasan untuk berbicara, kebebasan berpikir dan beragama, kebebasan untuk bergerak dan berasosiasi serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur kepemilikannya. Hak-hak politik berkenaan dengan kondisi-kondisi yang menjamin orang untuk berpartisipasi dalam penggunaan kekuatan politik -- dengan menguasai lembaga negara, memilih anggota-anggota dewan perwakilan yang merumuskan kebijakan dan mengeluarkan berbagai aturan serta dengan melibatkan diri dalam pelaksanaan hukum melalui keanggotaan sebagai 'juri'. Warga negara dengan demikian diasumsikan sebagai seorang yang berhak berpartisipasi dalam proses politik. Hanya dengan demikian, warga negara memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk memerintahnya. Hak sosial berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan standar dasar kehidupan dan kesejahteraan. Ini biasanya direalisasikan melalui pelebagaan negara kesejahteraan (*welfare state*). Murdock dan Golding (1989) memberi interpretasi baru terhadap hak ketiga ini. Menurut mereka, warga negara juga berhak untuk memperoleh akses universal pada fasilitas komunikasi dan informasi. Karena hal ini menyangkut kondisi-kondisi yang memungkinkan rakyat mewujudkan hak-hak kewarganegaraan mereka yang lainnya seperti hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dengan demikian, hak untuk akses terhadap komunikasi dan informasi menjadi prasyarat dasar bagi perealisasi kewarganegaraan.

Lebih lanjut Murdock dan Golding (1989:183-184) melihat adanya tiga jenis hubungan antara komunikasi dan kewarganegaraan. *Pertama*, orang harus punya akses pada informasi, nasehat-nasehat dan analisis yang memungkinkan mereka untuk mengetahui hak-hak mereka di ruang lain dan memungkinkan mereka untuk mencapai hak ini secara efektif. *Kedua*, mereka harus punya akses kepada kemungkinan jangkauan atau cakupan informasi yang paling luas, interpretasi dan debat pada bidang-bidang yang melibatkan pilihan politik dan mereka harus mampu menggunakan fasilitas komunikasi dalam usaha untuk melakukan kritik, memobilisasi oposisi dan menawarkan alternatif

tindakan. *Ketiga*, mereka harus mampu mengetahui diri mereka dan aspirasi mereka dalam beragam perwakilan yang ditawarkan dalam sektor komunikasi penting dan mampu menyumbang pengembangan perwakilan-perwakilan tersebut.

Berdasarkan hubungan tersebut, Mudock dan Golding berpendapat bahwa sistem komunikasi dan informasi harus memiliki dua ciri utama. Pada tingkat produksi, ia harus menawarkan keberagaman dan menyediakan umpan balik dan kemungkinan partisipasi bagi khalayak. Pada tingkat konsumsi, ia harus dapat menjamin akses universal orang terhadap lembaga komunikasi terlepas dari penghasilan dan tempat tinggal orang. Dengan pertimbangan tersebut, system media yang biasanya diatur melalui UU Media Massa harus menjamin kedua kepentingan tersebut.

Dikaitkan dengan kehidupan politik, media massa harus mampu menyajikan informasi tentang berbagai isu publik bagi setiap warga negara, sehingga mereka dapat menentukan pilihan-pilihan dan dukungan politis yang dibuatnya secara memadai. Warga negara dapat menentukan pilihannya berdasarkan informasi yang tersedia.

Atas dasar itu, fungsi media massa atau pers dalam demokrasi mencakup: pers atau media sebagai *civic forum*, pers sebagai pengawas pemerintah atau lembaga-lembaga publik dan pers sebagai agen mobilisasi dukungan warga terhadap suatu posisi politis (Norris, 2001). Inilah tiga fungsi yang dapat dipakai sebagai patokan atau kriteria dalam mengukur kinerja media dikaitkan dengan demokrasi. Tentu ada cara lain untuk mengukur kinerja media dalam konteks yang lebih luas seperti misalnya yang berkaitan dengan fungsi edukasi dan fungsi kebudayaan dari media atau pers. Akan tetapi menurut Norris, hanya fungsi politis dari pers yang bisa diidentifikasi sebagai patokan utama untuk mengukur kinerja media dalam demokrasi perwakilan Schumpeterian.

MEDIA MASSA SEBAGAI FORUM WARGA

Media massa atau pers sebagai civic forum biasanya dikaitkan dengan gagasan Habermas (1989) tentang *public sphere*. Gagasan dasar tentang *public sphere* yang dikemukakan Habermas menyatakan bahwa terdapat ruang atau suasana/iklim yang memungkinkan orang sebagai warga negara mendiskusikan persoalan publik secara bebas tanpa restriksi dari kekuatan politik, sosial dan ekonomi yang ada. Habermas melacak ruang atau forum-forum diskusi itu sampai ke zaman Yunani Kuno dalam kehidupan negara kota. Dalam perkembangan kemudian, di Eropa terdapat berbagai media kaum intelektual

dan terbitan lain yang memuat '*public affair*' yang dianggap sebagai media yang ideal untuk menjadi tempat proses berlangsungnya diskusi mengenai persoalan publik bersamaan dengan pers radikal dan tempat-tempat pertemuan di salon-salon dan warung kopi di London, dan beberapa kota lain di Eropa.

Sebagai *civic forum*, media massa atau pers harus berfungsi pada tingkat yang umum sebagai saluran bagi pemerintah dan yang diperintah untuk berkomunikasi secara efektif. Pers atau media massa bertindak sebagai penghubung penting yang menghubungkan secara horizontal para politisi dan secara vertikal antara aktor-aktor politik dan para pemilih atau warga negara biasa.

Dari gagasan ini, pers harus mampu memberi peluang pada perdebatan di kalangan warga negara tentang berbagai isu publik. Oleh karena itu, menurut Norris media massa harus menyajikan liputan politik yang komprehensif dan mudah untuk diakses oleh seluruh sektor atau kelompok warga. Sebagai forum warga, media harus mampu merefleksikan keanekaragaman politis dan kultural yang ada dalam masing-masing masyarakat, tentu dengan tetap menggunakan standar-standar jurnalistik yang ada. Standar-standar jurnalistik untuk melihat kinerja media menyangkup di dalamnya aspek objektivitas yang meliputi dimensi faktualitas dan impartialitas. Dalam dimensi faktualitas tercakup dialaminya kebenaran, relevansi dan keinformatifan, sedangkan dalam prinsip impartialitas terdapat aspek balance/non-partisanship dan penyajian netral (dalam McQuail (1992)

Sayangnya, hasil-hasil penelitian mutakhir tentang isu ini cenderung menghasilkan kesimpulan yang menempatkan media massa mulai berkurang perannya sebagai forum warga karena semakin rendahnya liputan-liputan mendalam dan laporan-laporan investigatif yang dibuat media. Hasil penelitian Wasburn (1995:647-676) memperlihatkan bahwa laporan-laporan yang dibuat oleh penyiaran swasta terutama dalam kasus kampanye pemilu punya kecenderungan *terdekontekstualisasi*, *dramatis* dan *trivial*. Laporan yang terdekontekstualisasi terjadi ketika peristiwa-peristiwa dilaporkan tanpa konteks sosial tempat suatu peristiwa terjadi. Peristiwa yang mungkin saling terkait dilaporkan sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Bagi TV komersial, menurut Wasburn, proses dekontekstualisasi ini memang memberi dua keuntungan. *Pertama*, peliputan yang terisolasi kelihatannya lebih 'objektif.' Sebuah berita hanya merekam sebuah kejadian. Penyajian sejarah, struktur, budaya dan informasi kontekstual lainnya mengimplikasikan sebuah perspektif dan dengan demikian menjadi laporan yang bias. *Kedua*, laporan yang terdekontekstualisasi secara komparatif tidak mahal (Wasburn, 1995:655). Menyajikan laporan yang berkonteks akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk riset yang dengan sendirinya akan menambah biaya peliputan dan

berarti dapat mengurangi keuntungan atau malah merugikan, ketika berita belum menjadi program yang bisa menarik pemasang iklan.

Dalam jangka panjang, laporan semacam ini tidak menjadikan khalayak sebagai warga negara yang semakin bertambah pengetahuannya atau semakin memahami suatu persoalan secara lebih memadai. Akan tetapi justru menjadikan mereka semakin terasing dari persoalan kehidupan yang semakin kompleks. Ini tentu saja, tidak membantu khalayak sebagai warga negara, tetapi justru mendegradasi kedudukan khalayak sebagai warga negara. Jelas, berita atau laporan media yang terdekontekstualisasi sangat tidak membantu proses demokratis dalam masyarakat secara lebih komprehensif.

Dramatisasi berita atau peristiwa terjadi ketika berita menekankan skenario dramatis pada peristiwa yang dilaporkan, dengan menyajikan atau menonjolkan konflik pribadi para kandidat dalam kampanye daripada mengulas program yang menjadi isu dalam kampanye. Pendapat ini dapat dibandingkan dengan pendapat Masduki (*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 1, 2004) yang dimuat dalam artikel “Jurnalisme Politik: Keberpihakan Media dalam Pemilu” yang mengulas kecenderungan jurnalisme politik menjadi jurnalisme propaganda dan jurnalisme kaum borjuis.

Menurut Wasburn (1995:659), paling tidak ada empat ukuran yang dapat digunakan untuk melihat apakah sebuah berita mendramatisasi peristiwa atau tidak. *Pertama*, berita terfokus pada konflik antar kandidat atau partai; *Kedua*, berita tidak punya referensi pada isu sosial, budaya dan ekonomi yang relevan dengan peristiwa atau kampanye; *Ketiga*, berita tidak berisi referensi pilihan kebijakan, dan keempat, berita berisi kata atau frase emotif.

Trivialisasi dalam berita kampanye terjadi ketika sebuah berita tentang kampanye hanya berfokus pada kampanye itu sendiri, bukan isu yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kandidat atau partai (Wasburn, 1995:659)

MEDIA SEBAGAI WATCHDOG

Fungsi lain pers dalam masyarakat demokratis berkaitan dengan kenyataan bahwa agar demokrasi dapat berjalan atau menjadi kenyataan hidup diperlukan hak-hak politik dan kebebasan sipil untuk melindungi kepentingan kelompok minoritas dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, pers memiliki fungsi sebagai *watchdog* (anjing penjaga) yang berfungsi untuk mengawasi mereka yang memiliki kekuasaan baik dalam bidang politik (pemerintah), organisasi nirlaba maupun dalam sektor swasta. Ini dilakukan agar mereka bertanggungjawab terhadap segala tindakan mereka.

Dalam kaitan ini, pers dianggap sebagai kekuatan keempat setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang dianggap sebagai salah satu kekuatan untuk menjamin adanya *check and balances* dari berbagai kekuasaan yang ada. Dalam peranan yang demikian ini, pers harus mampu melahirkan laporan-laporan investigative untuk menampilkan berbagai penyelewengan kekuasaan yang berlangsung dalam berbagai lembaga yang ada.

Untuk itu, para pekerja pers dituntut agar dapat melakukan peliputan bukan saja yang berupa peristiwa-peristiwa sesaat dalam bidang politik yang seringkali hanya menampilkan peristiwa-peristiwa yang bersifat permukaan, tetapi juga membuat laporan yang lebih mendalam tentang berbagai kehidupan para pemegang kekuasaan. Dengan demikian, pers akan mampu memberi informasi yang berbeda dengan informasi yang mungkin sudah 'dimanage' oleh para politisi untuk menjaga citra/image mereka. Saat ini, kemajuan dalam bidang kehumasan dan pemasaran politik, telah dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para politisi atau pemegang kekuasaan untuk *manage* setiap peristiwa sedemikian rupa sehingga mereka selalu 'tampak baik' di dalam media massa. Jika laporan-laporan yang demikian menjadi isi media massa/pers, tentu pendidikan politik sulit diharapkan terjadi. Yang terjadi justru usaha untuk memperdaya warga negara melalui manipulasi laporan dalam media. Hal ini pernah dibahas oleh John Tulloch (1993) dalam artikel yang berjudul "Policing the Public Sphere-the British Machinery of News Management" (dalam *Media, Culture and Society*, 1993 Vol 15:363-384) yang antara lain mengulas fenomena '*news management*' yang diterapkan oleh berbagai organisasi untuk mempengaruhi liputan media melalui (1) produksi informasi dan berbagai peristiwa secara terencana dan/atau (2) penciptaan hubungan yang manipulatif dengan wartawan dan para eksekutif media. Para politisi atau partai pun punya kecenderungan melakukan 'manajemen berita' untuk memperoleh peliputan yang *favourable* di media massa.

Persoalannya, anjing penjaga yang ada justru kini tidak lagi menjadi anjing menjaga yang berfungsi sebagai pelayan kepentingan umum. Meminjam ungkapan James Curran, saat ini ada kecenderungan *State-linked watchdogs can bark, while private watchdogs sleep.* Pers sebagai watchdog dalam kenyataan sekarang sudah mulai diikat kakinya dan dijinakkan gonggongannya. Betapapun, anjing biasanya sangat paham dengan tuannya. Dia tak akan menggonggong apalagi menggigit tuannya, walau mungkin tuannya melakukan tindakan yang mencurigakan. Dia hanya menggonggong orang asing yang tidak begitu dikenalnya. Ini terjadi mengingat dalam kehidupan pers saat ini sudah terjadi tumpang tindih dalam kepemilikan. Pers sudah mulai dimiliki oleh pengusaha yang juga sekaligus terjun sebagai politisi. Sebagian dari mereka sadar dengan kekuatan media yang dapat dimanfaatkan untuk meraih

keuntungan politis. Dalam keadaan demikian, sangat sulit bisa diharap media massa dapat menjadi anjing penjaga yang galak terhadap kekuasaan. Untungnya, tidak semua mereka yang sukses dalam bisnis media massa berubah menjadi politisi. Masih bisa disaksikan sejumlah pemilik media tidak tergiur dengan status sebagai politisi

Saat ini banyak juga pers yang diharapkan berfungsi sebagai *watchdog* telah dipelihara oleh orang atau lembaga yang harus digonggongnya. Pada level kelembagaan, dapat disaksikan kecenderungan terjadinya pemusatan atau penguasaan media media oleh para pemilik modal yang kemudian juga terjun dalam politik. Pada level praktek jurnalistik, di beberapa lembaga pemerintah masih bisa dijumpai anggaran untuk membina wartawan sebagai pos yang disediakan dalam APBD. Ini adalah bentuk penjinakan oleh orang lain terhadap pers sebagai *watchdog*. Di tingkat pusat, kita mendengar selentingan adanya wartawan dari media tertentu yang tidak diikuti dalam berbagai perjalanan ke manca negara mengingat pers bersangkutan terlalu keras, barangkali' gonggongannya sehingga dapat membangunkan warga yang terbuai pulas dengan pelancongan ke manca negara.

MEDIA SEBAGAI AGEN MOBILISASI

Demokrasi perwakilan mensyaratkan adanya partisipasi warga dalam pemilu secara bebas, fair dan periodic. Melalui criteria ini, media massa atau pers sukses bila media mampu mendorong warga negara belajar tentang politik dan permasalahan publik/bersama sehingga warga negara dapat menentukan pilihan-pilihan politik mereka secara lebih cerdas. Di samping itu, kesuksesan media juga dilihat dari kemampuannya untuk menstimulasi kepentingan dan diskusi akar rumput serta kemampuannya mendorong publik untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk di dalamnya ikut memilih pada saat pemilu. Intinya, media di samping sebagai forum warga dan sebagai *watchdog*, juga bertindak sebagai agen mobilisasi dukungan politik. Media massa berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam proses-proses politik yang berlangsung (Norris, 2000).

Apakah media massa Indonesia sudah mampu menjalankan fungsi ketiga ini? Ada dua pandangan yang saling bertolak belakang: pesimis dan optimis. Pandangan pesimis melihat bahwa media massa telah menyebabkan publik semakin apatis terhadap persoalan-persoalan kehidupan bersama, membentuk

sikap sinis warga masyarakat terhadap para politisi dan dalam pemilu telah memperngaruhi penurunan jumlah orang yang berpartisipasi dalam pemberian suara. Dari pengalaman beberapa negara industri maju, pandangan pesimis ini mendapat dukungan dengan semakin tererosinya dukungan terhadap berbagai lembaga politik yang ada serta rendahnya partisipasi warga dalam pemilu. Ini diduga sebagai akibat dari praktek-praktek pemberitaan dalam bidang politik yang cenderung didominasi oleh personalisasi, kejahatan dan kekerasan, dan liputan politik yang terfokus pada model '*horse-race polls*' daripada yang berfokus pada isu-isu politis yang relevan (Norris, 2000).

Pandangan optimis melihat bahwa di samping adanya kenyataan kecenderungan terjadinya 'tabloidisasi' berita dan meningkatnya 'infotainment' yang tidak memiliki kaitan dengan pemahaman permasalahan kehidupan bersama, juga masih terdapat media massa yang masih konsisten untuk melakukan peliputan masalah-masalah politik serius. Masih ada media yang secara kontinyu memberikan ulasan dan juga menyajikan laporan-laporan penting bagi pendidikan politik warga negara.

PENUTUP

Tiga fungsi media seperti yang sudah dibahas di depan patus dijadikan patokan untuk dalam melihat kinerja media massa dan demokrasi di Indonesia. Namun demikian, di atas semua itu, untuk mengukur kinerja media massa dengan pendekatan-pendekatan yang lebih praktis, terutama dari segi etika jurnalisme tetap perlu dilakukan. Akan tetapi, mengukur kinerja dari etika jurnalisme saja sudah tidak lagi memadai. Melihat kinerja media massa atau pers Indonesia perlu dilakukan secara komprehensif baik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih teknis jurnalistik pada level standar maupun dengan pendekatan-pendekatan yang lebih makro serta dengan melibatkan penilaian dari khalayak.



DAFTAR PUSTAKA

- Habermas, Jurgen, (1989). *The Structural Transformation of Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: Polity Press.
- Masduki, (2004). 'Jurnalisme Politik: Keberpihakan Media dalam Pemilu.' *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 1
- McQuail, Dennis, (1992). *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*. London: Sage Publications.
- Murdock, G. & Golding, P. (1989). 'Information Poverty and Political Inequality: Citizenship in the Age of Privatized Communications.' *Journal of Communication*. Vol. 39(3), 180-195.
- Norris, Pippa, (2000). *A Virtuous Circle: Political Communications In Post-Industrial Societies*. New York: Cambridge University Press.
- Sreberny-Mohammadi, Annabelle (1995). 'Forms of Media as Ways of Knowing.' Dalam J. Downing, A. Mohammadi & A. Sreberny-Mohammadi (eds). *Questioning the Media*. Edisi kedua. London: Sage Publications
- Tulloch, John (1993). 'Policing the Public Sphere – the British Machinery of News Management', *Media, Culture and Society*, Vol. 15, pp. 363-384
- Wasburn, Philo C. (1995). 'Democracy and Media Ownership: a Comparison of Commercial, Public and Government Broadcast News.' *Media, Culture and Society*, Vol. 17, pp 647-676.